#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembnag yang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu Negara, masalah-masalah yang terjadi pada Negara tersebut akan semakin kompleks. Sebuah Negara tidak akan pernah lepas dari berbagai masalah yang pastinya berhubungan dengan warga negaranya. Terkabih pada Negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Adapun masalah perekonomian yang sudah tidak lazim di Indonesia adalah pengangguran.

Salah satu masalah yang sering dihadapi negara berkembang, seperti Indonesia, adalah pengangguran. Perekonomian suatu negara dapat terdampak negatif oleh tingginya angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang baik, meningkatnya standar hidup, dan pemerataan pendapatan yang lebih besar semuanya dapat tercermin dalam rendahnya angka pengangguran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Karena pemborosan sumber daya yang penting dan tingginya angka pengangguran mengakibatkan hilangnya produksi produk dan layanan yang sebenarnya mampu diproduksi oleh para penganggur, pengangguran akan selalu menjadi perhatian bagi perekonomian (Febriana Sulistya Pratiwi., 2022).

Menurut Doni et al (2023) Pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan ataupun sedang mempersiapkan usaha ataupun penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah memiliki pekerjaan tetapi ia belum mulai untuk bekerja. Orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja, atau mereka yang tidak

bekerja tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau sedang mendirikan usaha (Murapi et al., 2021).

Suatu negara dapat mengalami pengangguran jika jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu wilayah terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja atau jika jumlah tawaran dan permintaan pekerjaan tidak seimbang. Akibatnya, jumlah orang yang memasuki dunia kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran dapat mengakibatkan kemiskinan dan kerentanan sosial jika tidak segera diatasi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa di negara-negara berkembang tertentu, persentase angkatan kerja yang menganggur meningkat di samping tingkat pengangguran secara keseluruhan.

Untuk pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.

- Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai 50.489.208
  jiwa, atau 17,88% dari total penduduk Indonesia.
- Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2024 mencapai 38.280.887 jiwa, atau 13,46% dari total penduduk Indonesia.
- Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2024 mencapai 41.714.928 jiwa, atau 14,85% dari total penduduk Indonesia.

Masalah pengangguran tidak hanya mempengaruhi negara secara keseluruhan tetapi juga daerah-daerah tertentu, Khususnya seperti Provinsi Jawa Tengah.

Masalah pengangguran yang dialami di jawa tengah ditunjukan dengan tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun.

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Tingkat Pengangguran
2010	6,21%
2011	7,07%
2012	5,61%
2013	6,01%
2014	5,68%
2015	4,99%
2016	4,63%
2017	4,57%
2018	4,47%
2019	4,44%
2020	6,48%
2021	5,95%
2022	5,57%
2023	5,13%

Sumber: Badan pusat statistik Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pengangguran setiap tahunnya, yang merupakan masalah serius yang perlu ditangani oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pengangguran merupakan suatu masalah yang paling sering dialami oleh seluruh negara, baik dinegara berkembang maupun negara maju. Tingginya tingkat pengangguran suatu negara akan mencerminkan baik buruknya suatu perekonomian di negara/wilayah. Salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh suatu negara adalah masalah pengangguran yang akan berdampak pada berbagi masalah kriminalitas, sosial politik dan kemiskinan (Murapi et al., 2021).

Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh sejumlah indikator ekonomi, seperti laju pertumbuhan PDRB, upah minimum, dan inflasi. Menurunkan tingkat pengangguran merupakan tugas yang sulit; meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang

bertujuan untuk itu, tingkat pengangguran belum menurun seperti yang diharapkan.

Orang yang bekerja kurang dari dua hari seminggu, tidak mencari pekerjaan sama sekali, atau sedang berusaha mencari pekerjaan yang bermutu dianggap sebagai pengangguran. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pekerja dan kuantitas kesempatan kerja. Jika dilihat dari sudut ekonomi dan sosial, pengangguran dapat menimbulkan sejumlah masalah. Misalnya, menurunnya produktivitas, menurunnya daya beli, menurunnya pendapatan pajak pemerintah, meningkatnya kejahatan, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya pengangguran, semuanya dapat berdampak pada kemampuan suatu negara untuk mempertahankan stabilitas politik dan ekonominya (Fahmi, 2022).

Pada umumnya, pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Salah satu penyebab sering terjadinya masalah pengangguran muncul karena adanya peningkatan angkatan kerja yang dapat dikatakan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan maupun jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi (Suwarni, 2016).

Permasalahan strategis di pemerintah jawa tengah tidak jauh beda dengan di pemerintah pusat, yakni masih tingginya angka pengangguran. Mengingat banyaknya jumlah angkatan kerja yang muncul disetiap tahunya, serta beberapa faktor seperti tingkat umr dan inflasi di jawa tengah membuat banyak masyarakat yang sulit untuk mencari pekerjaan atau yang disebut dengan pengangguran.

Dalam perekonomian Republik Indonesia, masalah pengangguran selalu menjadi masalah yang harus diselesaikan. Jumlah orang yang bekerja meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, yang juga berdampak pada peningkatan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan masalah pengangguran

ini sesegera mungkin untuk memutuskan rencana tindakan yang komprehensif.

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa tengah masih belum kondusif atau belum membaik, sehingga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2010 sampai tahun 2021 seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah

					_
KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Cilacap	7,24	9,1	9,97	9,62	8,74
Kab. Banyumas	4,17	6	6,05	6,05	6,35
Kab. Purbalingga	4,73	6,1	6,05	5,23	5,61
Kab. Banjarnegara	4,44	5,86	5,86	6,38	6,26
Kab. Kebumen	4,69	6,07	6,03	5,92	5,11
Kab. Purworejo	2,91	4,04	3,59	4,45	4,02
Kab. Wonosobo	3,43	5,37	5,26	5,01	4,95
Kab. Magelang	3,07	4,27	5,03	4,97	4,42
Kab. Boyolali	3,09	5,28	5,09	4,92	4,05
Kab. Klaten	3,54	5,46	5,48	4,31	4,20
Kab. Sukoharjo	3,39	6,93	3,32	2,47	3,40
Kab. Wonogiri	2,55	4,27	2,43	1,95	1,92
Kabupaten Karanganyar	3,12	5,96	5,89	5,70	4,35
Kab. Sragen	3,32	4,75	4,76	4,69	3,87
Kabupaten Grobogan	3,54	4,5	4,38	4,40	4,02
Kab. Blora	3,82	4,89	3,81	3,70	3,10
Kabupaten Rembang	3,6	4,83	3,67	1,76	2,60
Kab. Pati	3,64	4,74	4,6	4,45	4,29
Kab. Kudus	3,8	5,53	3,77	3,21	3,25
Kab. Jepara	2,92	6,7	4,23	4,10	3,35

Kab. Demak	5,42	7,31	5,28	6,11	5,38
Kabupaten Semarang	2,54	4,57	5,02	4,81	4,05
Kabupaten Temanggung	2,98	3,85	2,62	2,54	2,32
Kab. Kendal	6,26	7,56	7,55	7,34	5,76
Kab. Batang	4,11	6,92	6,59	6,64	6,06
Kabupaten Pekalongan	4,35	6,97	4,28	3,23	3,25
Kabupaten Pemalang	6,45	7,64	6,71	6,63	6,55
Kab. Tegal	8,12	9,82	9,97	9,64	8,60
Kab. Brebes	7,39	9,83	9,78	9,48	8,98
Kota Magelang	4,37	8,59	8,73	6,71	5,25
Kota Surakarta	4,16	7,92	7,85	5,83	4,58
Kota Salatiga	4,33	7,44	7,26	5,58	4,57
Kota Semarang	4,5	9,57	9,54	7,60	5,99
Kota Pekalongan	5,8	7,02	6,89	4,98	5,02
Kota Tegal	8,08	8,4	8,25	6,68	6,05
Provinsi Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13

Sumber: Badan pusat statistik Provinsi Jawa Tengah

Pada table 2 diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsi di Pulau Jawa Tengah pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 fluktuatif. Mungkin dengan jumlah sekitar 37,61 juta jiwa di Pulau Jawa Tengah masih ada yang menganggur dan tidak mendapatkan pendapatan. Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi pengangguran, namun masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Laju peningkatan kesempatan kerja tidak sebanding dengan laju peningkatan pencari kerja. Pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan tidak dapat terserap seluruhnya di dunia kerja, sehingga menimbulkan adanya pengangguran terbuka yang jumlahnya masih mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya.



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2023

Sumber: Badan pusat statistik Indonesia

Pengangguran terbuka adalah pengangguran dimana mereka sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Menurut Disnakertrans apabila angkatan kerja bekerja satu jam dalam sehari sudah tidak dikategorikan dalam pengangguran terbuka. Penganggur terbuka yang tidak memiliki penghasilan akan menambah beban keluarga dan masyarakat. Selain itu tingginya jumlah pengangguran terbuka akan membawa dampak pada penurunan produktivitas dan daya beli masyarakat, kriminalitas, masalah sosial lainya, serta kemiskinan yang tentu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi maupun politik. Pengangguran terbuka di jawa tengah pada tahun 2010 mencapai sebesar 6,21%, tahun 2011 sebesar 7,07%, tahun 2012 sebesar 5,61%, tahun 2013 sebesar 4,63%, tahun 2014 sebesar 5,68%, tahun 2015 sebesar 4,99%, tahun 2016 sebesar 4,63%, tahun 2017 sebesar 4,57%, tahun 2018 sebesar 4,47%, tahun 2019 sebesar 4,44%, tahun 2020 sebesar 6,48%, tahun 2021 sebesar 5,95% tahun 2022 sebesar 5,57%, tahun 2023 sebesar 5,13% pengangguran terbuka.



Gambar 2 Grafik PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010- 2023

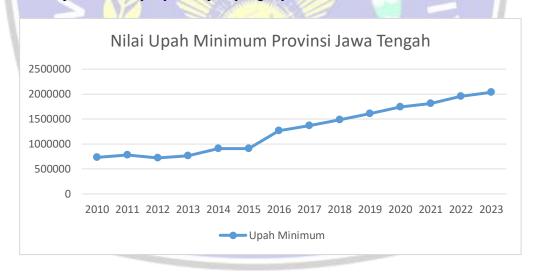
Sumber: Badan pusat statistik Indonesia

Pada gambar 2 dapat diketahui laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah dari rentang tahun dalam penelitian ini mengalami peningkatan dan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.30%. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 5.47% dan laju pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 5.11%, Kemudian pada Saat Tahun 2020 Mengalami Penurunan Sebesar -2.65% dikarenakaan terjadi Bencana covid 19.

Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam pengangguran di Indonesia adalah masalah upah. Upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi (Sholihah, 2016). Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Murapi et al., 2021). Upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat upah langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri,

dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan (Beno et al., 2022).

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan hubungan dengan besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Nuzulaili, 2022). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja. Untuk menjamin kesejahteraan pekerja, di suatu wilayah dikenal dengan adanya upah minimum regional. Upah minimum diatur dalam Undang-Undang sebagai acuan sebuah perusahaan untuk memberikan imbalan kepada pekerjanya, hal ini menjadi patokan bagi pekerja untuk mendapatkan haknya, yaitu upah yang layak.



Gambar 3 Grafik Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010- 2023

Sumber: Badan pusat statistik Indonesia

Pada gambar 3 dapat diketahui Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah dari rentang tahun dalam penelitian ini mengalami peningkatan dan rata-rata pertumbuhan Upah Sebesar 8%. Laju pertumbuhan Upah Minimum tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 39% dan laju pertumbuhan Upah Minimum

terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 4%. Pada Tahun 2015 tidak Mengalami kenaikan sama sekali Sebesar 0% Kemudian Penurunan Terendah Pertumbuhan Upah Minimum terjadi pada tahun 2012.

Kenaikan upah yang terjadi akibat inflasi akan mendorong suatu perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerjanya dalam rangka minimalisasi biaya produksi, karena upah pekerja termasuk dalam biaya produksi. Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen manapun. Para pengusaha selalu berupaya mempertahankan haknya atas bisnisnya yaitu kelayakan biaya dan keuntungan dalam produksinya. Namun, dipihak lain para buruh berusaha mendapatkan hak atas kelayakan hidup sebagai manusia yaitu dengan mendapatkan upah minimum tiap tahunnya. Meskipun kenaikan yang diterima jauh dari harapan, setidaknya sedikit meringankan kesulitan hidup buruh ditengah tekanan hidup yang tinggi yang mereka alami. Perbedaan penetapan upah minimum disuatu daerah atau provinsi tentu didasarkan atas harga kebutuhan pokok disuatu daerah tersebut.



Gambar 4 Grafik Inflasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010- 2023

Sumber: Badan pusat statistik Indonesia

Pada gambar 4 dapat diketahui Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dari rentang tahun dalam penelitian ini mengalami tingkat kenaikan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,22%, hingga akhirnya pada tahun

2015 mengalami penururnan sebesar 2.36% kemudian mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Inflasi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah 2010-2023".

### 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah?
- 2. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah?
- 3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah?
- 4. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi dan tingkat upah minimum secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran di i provinsi Jawa Tengah?

## 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- 1) Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
  - b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
  - c. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
  - d. Untuk mengetahui pertumbuhan PDRB, pengaruh upah minimum dan tingkat inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah.

### 2) Manfaat Penelitian

# a. Bagi Universitas muhammadiyah Ponorogo

Refrensi Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terkait dengan Pengaruh pertumbuhan pdrb, tingkat inflasi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di provinsi jawa tengah.

## b. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menambah penegtahuan Mahasiswa tentang Pengaruh pertumbuhan pdrb, tingkat inflasi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di provinsi jawa tengah ini. Mahasiswa juga diharapkan dapat membuka wawasan peneliti ketika memasuki dunia kerja nanti.

# c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

PONOROGO